

**Kontruksi Politik Atas Kepemimpinan Wanita :
Studi Peran Qadhi Malik Adli Pada Masa Pemerintahan Ratu Abad Ke 17**

Toto Haryanto

Dosen Program Studi Ilmu Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
haryantozaini@yahoo.co.id

Abstrac

Political Construction of Women's Leadership (Study of the Role of Qadhi Malik Adli During the Reign of the 17th Century) Sultanahs, especially Sultanah Shafiyah al-Din were able to govern the kingdom without significant opposition from religious and religious scholars, at least until the death of Shaykh 'Abd al-Ra'uf Syncili in 1693. He did not see a forbidden woman occupying the highest office and instead emphasized the moral attributes of the ruler over other features. It is very important that the queens play a major role in negotiating the rules of women in Islam and succeed in gaining sustained support from the religious elite. They do this by basing their authority on God's will and legitimizing their power based on the ways in which they live God's law. were the deciding factors for the emergence and survival of the queen in the Kingdom of Aceh at that time. The religious dimension seems to play a greater role and determinant. This can be proven from the fact that for the people of Aceh, this controversy is not merely a political issue, but more importantly how the issue touches on religious territory. Only with religious support, especially those who came from al-Raniri, were the first women to ascend the throne, and also only with the power of religion, namely the fatwa, women's rule ended in this kingdom. Religious approval (support) also plays a vital role in the long history of the queen's government, and the main figure in this case is al-Sinkili. His status as the holder of the highest religious authority in the kingdom was highly respected, so that his moderate views and support for women's rule did not face serious challenges.

Key Words: Construction, Politics, Leadership, Women, Qadhi Malikul Adil, Ratu

Abstrak

Kontruksi Politik Atas Kepemimpinan Wanita (Studi Peran Qadhi Malik Adli Pada Masa Pemerintahan Ratu Abad Ke 17) Para Sultanah, khususnya Sultanah Shafiyah al-Din mampu memerintah kerajaan tanpa oposisi berarti dari agamawan dan ulama, setidaknya sampai wafatnya Syekh 'Abd al-Ra'uf Sinkili tahun 1693. Beliau tidak melihat seorang perempuan terlarang menduduki jabatan tertinggi dan justru menekankan atribut moral penguasa daripada fitur lainnya. Hal ini sangat penting bahwa para ratu memainkan peranan utama dalam menegosiasikan aturan perempuan dalam Islam dan berhasil mendapatkan dukungan berkelanjutan dari para elit agamawan. Ini mereka lakukan dengan mendasarkan otoritas mereka pada kehendak Tuhan dan melegitimasi kekuasaan mereka berdasarkan cara-cara di mana mereka menjalankan hukum Tuhan. merupakan faktor-faktor penentu muncul dan bertahannya kekuasaan ratu di Kerajaan Aceh ketika itu. Dimensi agama kelihatannya memainkan peran yang lebih besar dan determinan. Ini dapat dibuktikan dari kenyataan bahwa bagi masyarakat Aceh,

kontroversi ini bukan merupakan isu politik semata, akan tetapi yang lebih penting bagaimana persoalan yang menyentuh wilayah agama. Hanya dengan dukungan agama, khususnya yang datang dari al-Raniri, perempuan pertama naik takhta, dan juga hanya dengan kekuatan agama, yaitu fatwa, kekuasaan perempuan berakhir di kerajaan ini. Persetujuan (dukungan) agama juga berperan sangat vital dibalik sejarah pemerintahan ratu yang panjang, dan tokoh yang utama dalam hal ini adalah al-Singkili. Statusnya sebagai pemegang otoritas agama yang tertinggi di kerajaan sangat dihormati, sehingga pandangannya yang moderat dan dukungannya terhadap pemerintahan perempuan tidak mendapat tantangan yang serius.

Kata Kunci: Kontruksi, Politik, Kepemimpinan, Wanita, Qadhi Malik Adli, Ratu

Latar Belakang

Lembaran sejarah umat Islam Indonesia menunjukkan pasang surut dalam perjuangan politiknya. Pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara (Haslim, 1988, p. 67), agama dan politik Islam tampak terjalin lebih erat. Para Ulama berperan penting di dalam kerajan diantaranya memberikan justifikasi kekuasaan kepada penguasa melalui legitimasi doktrin agama. Tome Pires juga menulis betapa peran penting para ulama (*mullah*) dari negeri-negeri Arab, Persia dan Bengal yang ikut memberikan kontribusi tidak hanya dalam dakwah Islam tetapi juga berperan dalam masuk Islamnya Iskandar Syah Raja Malaka.

Islam tidak sekedar menjadi Agama ritual ibadah semata, tapi juga sebagai kekuatan penyatu bagi keberagaman masyarakat yang kemudian menjadi bangsa Indonesia. Menurut Azra, hal inilah yang menjadikan Islam di Indonesia memiliki watak yang khas dan membedakannya dengan peradaban Islam di wilayah-wilayah lain di dunia. Sifat khas ini meliputi semua aspek kehidupan, dari spritual, intelektual, sampai budaya material.

Ulama-ulama terkenal yang muncul pada periode ini seperti , Al-Raniri (wafat 1608), Abdurrauf al-Singkili (1615-1693), Yusuf al-Maqassari (1627-1699) mereka semua merupakan alumnus dari Makkah. Ketika kembali ke Nusantara mereka tetap menjalin koneksitas dalam jaringan komunitas Jawi (ashab al-Jawiyyin) dengan guru-guru mereka di Makkah. Mereka pula yang bertanggung-jawab atas diseminasi pemikiran Islam yang berkembang di Makkah masa itu, neo-sufisme, ke Nusantara. Menurut Jajat poin penting yang dapat dicatat dari fakta ini adalah ulama-ulama tersebut menjadikan kerajaan sebagai tempat untuk melancarkan misi pembaharuan mereka. Al-Raniri dan Al-Singkili berkarier di kerajaan Aceh, adapun al-Maqassari membangun kariernya di kerajaan Banten , Jawa Barat (Azhra, 2004, p. 156).

Pengaruh Islam atas dunia melayu nusantara, terlebih lagi atas perjalanan sejarah politik di Aceh mulai dari fase pertama abad ke 8 M sampai saat ini sangat signifikan dan tidak bisa dipisahkan. Bahkan menurut Andaya, Islam lah yang telah memberikan berbagai keistimewaan dan keunggulan kepada Aceh dari para pesaing dalam kontestasi pengaruh di dunia melayu.

Naik dan turunya hegemoni kekuasaan yang mendiami Aceh selalu menyertakan peran ulama sebagai pihak yang paling representatif dalam mendiskusikan hukum Islam. Ito dalam *The World of the Adat Aceh* juga menegaskan peran ulama sebagai penasihat (advisor) dan sangat berpengaruh bagi kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Aceh. Dalam kerajaan Aceh Darussalam sendiri di kenal jabatan *Syaikh al-Islam* atau *Kadi Malik al-Adil*. Dimasa kekuasaan Iskandar Muda dikenal nama besar Syaikh Shams al-Din al-Sumatrani (w.1630), setelah itu muncul nama besar berikutnya Syaikh Nur al-Din al-Raniri yang menduduki jabatan Kadi Malik al-Adil mulai dari masa kekuasaan Iskandar Thani sampai masa awal kepemimpinan ratu Shafiyat al-Din Taj Alam. Berikutnya digantikan Syaikh Abd al-Rau'f al-Singkili sebagai Kadi Malik al-Adil sampai beliau wafat dan menjadi awal berakhirnya pula masa kepemimpinan ratu di Aceh (hadi, 2004, p. 113).

Permasalahanny dalam penelitian ini adalah Kontruksi Politik Atas Kepemimpinan Wanita (Studi Peran Qadhi Malik Adli Pada Masa Pemerintahan Ratu Abad Ke 17 ? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran warisan tradisi intelektual muslim Indonesia, khususnya Peran Qadhi Malik Adli Pada Masa Pemerintahan Ratu Abad Ke 17. Dengan demikian penelitian diharapkan akan bermamfaat dalam menambah khasanah studi sejarah dan pemikiran intelektual sekaligus memberikan kontribusi bagi pelestarian tradisi keilmuan di Indonesia.

Beberapa penelitian yang telah ditelusuri, belum ditemukan bahasan yang sama seperti pokok bahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, namun ada beberapa penelitian yang telah dilakukan baik dalam bentuk jurnal maupun disertasi yang hampir mendekati dengan pokok bahasan pada penelitian ini. Dalam proses pembacaan awal terhadap beberapa literatur terdahulu peneliti mendapatkan beragam studi terkait aspek-aspek tertentu yang memiliki relevansi dan menjadi referensi sangat berharga bagi penelitian ini. Secara garis besar studi-studi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Muhsin Alhaddar, "*Unsur Politik dalam Dunia Penafsiran Al-Qur'an "Kasus-Kasus Penafsiran Sahabat dan Aliran Teologi Islam"*" Oleh : Muhsin Alhaddar dalam Jurnal Rausyan

Fikr, Vol. 10, No. 2 Juli – Desember 2014. Dalam artikel jurnal ini penulis menjelaskan tentang kondisi perpolitikan dizaman sahabat Rasulullah SAW dan bagaimana kondisi tersebut memberikan pengaruh kepada penafsiran seorang mufassir (*ulama penafsir al-Qur'an*) sehingga munculnya aliran-aliran teologi. Begitu pula sebaliknya, para tokoh-tokoh aliran teologi menjadikan al-Qur'an sebagai doktrin untuk melegalkan tindakan politiknya dengan cara menginterpretasi ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan pemahaman kelompoknya. Penulis menekankan bahwa penafsiran tidak bisa lepas dari lingkungan setempat. Sedikit atau banyak hal ini sangat mempengaruhi sebuah penafsiran al-Qur'an. Sesuai dengan gagasan Khaled Abou el Fadl yang menggunakan hermenutik untuk mengungkap bagaimana seseorang bisa mewakili suara tuhan, tanpa harus menjadi tuhan. Penulis menyimpulkan jika semua penafsir menyadari bahwa apa yang menjadi penafsiran mereka akan sangat berpengaruh pada lingkungan, niscaya mereka akan lebih berhati-hati dalam menafsirkan al-Qur'an. Dalam tulisan ini yang menjadi subyek penelitian adalah zaman sahabat Nabi SAW dan penafsiran yang berkembang pada masa itu akibat munculnya aliran-aliran teologi.

Ibnu Hamad dari Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia dengan judul *KONSTRUKSI REALITAS POLITIK DALAM MEDIA MASSA (Studi Pesan Politik Dalam Media Cetak Pada Masa Pemilu 1999)* dalam jurnal MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 8, NO. 1, APRIL 2004. Ibnu Hamad dalam tulisannya ini menjelaskan bagaimana media massa mempengaruhi realitas politik dengan berbagai pemberitaan yang bertujuan memberikan dampak pencitraan terhadap partai-partai politik yang ikut dalam perhelatan PEMILU di tahun 1999. Dalam tulisannya ini Ibnu Hammad tidak menyinggung penggunaan teks-teks dalam kitab suci dalam menciptakan realitas politik yang diinginkan oleh peserta PEMILU dalam hal ini partai-partai politik.

Gati Gayatri, *Kotruksi Realitas Kepemimpinan Presiden Soeharto dalam Berita Surat Kabar, Analisis Kritis terhadap Makna Pesan Politis yang Disampaikan dengan Menggunakan Konsep Ajaran Kepemimpinan Jawa*. Disertasi ini ditulis untuk menjawab masalah teks dan makna teks. Untuk menjawab masalah tersebut dalam penelitian ini digunakan perspektif konstruktivisme (Peter L.Berger & Thomas Luckmann, 1966) yang dititikberatkan pada produksi makna oleh pelaku sosial pada tahap-tahap eksternalisasi dan obyekektivikasi. Teks yang dianalisis adalah berita surat kabar, dan surat kabar yang diteliti dipilih secara puspositive berdasarkan usia dan kredibilitasnya sebagai media berita. Berita yang dianalisis mencakup

seluruh berita yang menunjukkan adanya pernyataan atau pesan politik Presiden Soeharto yang disajikan dalam tiga surat kabar (Kompas, Suara Pembaharuan, Kedaulatan Rakyat) itu selama era kepemimpinan Presiden Soeharto, sejak 27 maret 1968 sampai dengan 21 Mei 1998.

Berdasarkan pemaparan kajian pustaka ini, penulis menemukan belum ada penelitian yang memang fokus memotret bangunan kontruksi politik diatas realitas teks di dunia melayu. Apalagi yang secara khusus menjelaskan bagaimana hegemoni kekuasaan dibangun dengan mengkonstruksi kebijakan-kebijakan politik dengan berpijak pada teks-teks agama seperti kitab Tafsir dan kitab Fiqih. Bagaimana kekuasaan kemudian dengan sangat rapi merancang formula, menginternalisasi pemahaman ditengah-tengah masyarakat dan mengontrol serta mengevaluasi pemahaman itu sehingga sesuai dengan kepentingan politik penguasa saat itu.

Kerangka Teori

Kebolehan wanita dalam memimpin menjadi topik pembahasan hukum Islam yang hangat dan *debatable*. Merujuk larangan atau kebolehan wanita menjadi pemimpin dilihat berdasarkan penafsiran al-Qur'an dan penjelasan hukumnya dalam hadis Nabi. Akan selalu memunculkan respon pro dan kontra. Akan kita temukan dalam banyak karya para peneliti yang secara rinci membicarakan masalah ini (Umar, Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an (Jakarta: Paramadina, 2001); Zaitunah Subhan, Rekonstruksi Pemahaman Jender dalam Islam 2002, p. 331). Superioritas kaum laki-laki atas kaum perempuan dalam masalah aturan agama seperti, perempuan dilarang untuk menjadi imam dalam pelaksanaan shalat berjama'ah selama masih ada laki-laki. Dibawa kedalam ranah sosial sehingga kaum perempuan tidak diperkenankan menjadi pemimpin umat, selama masih ada laki-laki. Permasalahan inipun menjadi perdebatan yang sengit manakala Kerajaan Aceh Darussalam harus beralih tampuk kekuasaan dari pundak para sultan ke dalam genggam tangan para sultanah.

Fakta historis kemudian membuktikan bahwa Kerajaan Aceh Darussalam tetap mampu bertahan walaupun tampuk kekuasaan tertinggi ada digenggam para ratu yang memimpin secara berurutan mulai dari tahun 1641 sampai dengan tahun 1699. Pola kepemimpinan seorang ratu berbeda dengan seorang raja, menurut Sher Banu A.L. Khan. Aceh dibawah kepemimpinan perempuan sangat berbeda dari model kepemimpinan kaum laki-laki pendahulunya yang menonjolkan pola kepemimpinan yang dibuat karismatik dan absolut berdasarkan kehebatan raja. Akan tetapi para sultanah memerintah dalam hak mereka sendiri, otoritas mereka dihormati

dan diterima oleh elit laki-laki. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kolaboratif berdasarkan pembagian kekuasaan, sepiut memang seolah-olah membatasi kekuasaan kerajaan, tetapi menurut Sher Banu justru gaya itu lebih cocok untuk memfasilitasi perdamaian, perdagangan dan diplomasi di era perdagangan dan itu adalah alasan utama yang membantu kerajaan Aceh Darussalam tetap mandiri secara ekonomi pada abad ketujuh belas. Selama 59 tahun Aceh dipimpin oleh kaum wanita, dengan segala pro dan kontra yang mengiringinya.

Melihat kondisi politik kerajaan Aceh Dar as-Salam di abad ke 16 sampai 17, saat dimana lahirnya karya monumental Syehk ‘Abd Al-Ra’ûf b. ‘Alî Al-Jâwî Al-Fansurî Al- Sinkilî dalam bidang Tafsir yaitu Tarjumân al-Mustafîd dan karya beliau dalam bidang hukum yaitu Mir’at at-Thullab. Pengangkatan Syehk ‘Abd Al-Ra’ûf b. ‘Alî Al-Jâwî Al-Fansurî Al- Sinkilî menjadi Qâdhi (Hakim Agung) dimasa itu oleh penguasa yang memerintah tentu ada pertimbangan-pertimbangan khusus, termasuk diantaranya tentu saja pertimbangan politis. Fasilitas yang diberikan oleh pihak penguasa dalam hal ini kerajaan untuk ikut menyebar luaskan pemikiran-pemikiran sang ulama dalam bentuk mencetak buku-buku karya beliau yang sangat banyak, rasanya tidak mungkin menutup mata dari alasan-alasan politis. Bahkan dapat diterima alasan ratu Shafiyatuddin ketika meminta secara khusus kepada Al-Sinkilî untuk menulis kitab tafsir dan kitab hukum dalam bahasa Melayu . Permintaan sang ratu kemudian direspon dengan baik oleh Al-Sinkilî, untuk kemudian beliau memilih sumber utama rujukan dalam penafsirannya dari berbagai kitab seperti tafsir Baydhâwi, Jalâlyn, dan Khâzin yang bermazhab syafi’i yang untuk kesekian kalinya tentu juga memuat alasan-alasan politis. Juga memilih mazhab Syafi’i dalam rujukan kitab hukumnya. Karena mazhab ini cukup moderat untuk masalah-masalah hukum.

Metode Penelitian

Penelitian dalam ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan model penelitian pustaka (*library reserch*) dengan menelaah secara teliti berbagai literatur-literatur yang relevan. Pendekatan penelitian dengan menggunakan konsep keilmuan, yaitu: sosiologis. Sedangkan sumber data adalah primer dan skunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah teknik heuristik, verifikasi, intervretasi, dan historisografi.

Hasil dan Diskusi

A. Fenomena Pemerintahan Perempuan (Ratu) Di Aceh Pada Abad Ke-17

Abad ke-17 merupakan masa keemasan Kerajaan Aceh Dar al-Salam. Puncaknya dipercayai dicapai pada masa pemerintahan Iskandar Muda (memerintah 1607-1636). Dalam ingatan masyarakat Aceh, sultan yang agung inilah yang dianggap telah berjasa membawa kerajaan ini ke puncak kejayaannya dalam segala bidang. Aceh pada saat itu merupakan sebuah kerajaan Islam yang bercirikan ke-Aceh-an. Namun, kepercayaan ini ditolak oleh Christian Snouck Hurgronje yang menegaskan bahwa kejayaan Aceh pada masa ini hanya mitos. Iskandar Muda sesungguhnya bukan sultan yang agung, melainkan hanya seorang raja kecil. Di samping itu, peran Islam yang dianggap besar di kerajaan ini, terutama pada abad ke-17, juga dinafikan oleh orientalis asal Belanda ini. Kajian terkini terhadap subjek ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Aceh sesungguhnya mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 dan Iskandar Muda adalah penguasa yang besar (Lombard., 1986, pp. 34-35). Pada masa ini juga, sebagaimana pada abad-abad sebelumnya, Islam memainkan peran yang penting dalam kehidupan kerajaan (Hadi, 2004, p. 261).

Tidak dapat disangkal bahwa berbagai sumber menggiring kita kepada kesimpulan bahwa Aceh, sebagai sebuah kerajaan Islam, sesungguhnya mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17. Kerajayaan ini tentu bukan hasil dari kepemimpinan para penguasa Aceh kurun tersebut semata, terutama Iskandar Muda. Ia merupakan sebuah klimaks dari mata rantai yang panjang dari pembangunan kerajaan ini semenjak berdirinya secara resmi di akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 dengan menamakan diri sebagai “Kerajaan Aceh Dar al-Salam”. Adalah benar bahwa hasil kajian sejarah menunjukkan bahwa Iskandar Muda adalah seorang penguasa Aceh terbesar, namun ia sesungguhnya bukan pembangun landasan kerajaan ini. ‘Ali Mughayat Shah (wafat 1530), yang dikenal sebagai “the real founder of the empire of Aceh” dan “*the first Sultan of Greater Acheh*,” (Winstedt, 1932, pp. 34-36) juga bukan merupakan seorang pembangun sesungguhnya kerajaan ini.

Kedua penguasa ini sangat berperan dalam mata rantai pembangunan kerajaan. ‘Ali Mughayat Shah merupakan pendiri kerajaan. Ia secara gemilang telah melakukan perluasan wilayah dengan menaklukan beberapa kerajaan terpenting di sekitarnya, yaitu Daya (1520), Pidie (1521), dan Pasai (1524). Dengan demikian, sultan ini telah memberikan jalan yang lebih terbuka bagi pembangunan kerajaan ini secara lebih baik ke depan. Peran Sultan Iskandar Muda juga

tidak bisa dipandang remeh. Dengan kekuasaan dan kebesaran penguasa ini. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya dalam berbagai bidang, termasuk sosial, politik, agama, ekonomi, budaya, dan bahkan militer. Namun, seperti yang ditekankan di atas, penguasa ini bukanlah pembangun pertama berbagai tradisi kerajaan.

Peran luar biasa penguasa ini terlihat pada kemampuannya dalam meningkatkan mata rantai pembangunan tersebut, sehingga mencapai puncaknya yang tertinggi. Meskipun Iskandar Muda adalah penguasa yang bertanggung jawab terhadap kodifikasi sebagian besar aturan dan tradisi kerajaan yang terdapat dalam kitab Adat Aceh, namun ia sesungguhnya bukan penemu dan pembangun pertama tradisi tersebut. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa berbagai aturan dan tradisi tersebut telah dipraktikan sebelumnya, dan bahkan telah ada pada masa pemerintahan ‘Ala al-Din Ri’ayat Shah “al-Qahhar” (memerintah 1537-1571).

Kajian mendalam mengenai pemerintahan al-Qahhar menunjukkan bahwa ia adalah pembangunan sesungguhnya Kerajaan Aceh Dar al-Salam. Hal ini didukung oleh berbagai sumber luar dan tempatan. Mengenai sultan ini, *Bustan al-Salatin* menegaskan:

Ia-lah yang meng’adatkan segala isti’adat Kerajaan Acheh Daru’s Salam dan menyuroh utusan kepada Sultan Rum, ka-negeri Istanbul, karena menegohkan ugama Islam. Maka di-kirim Sultan Rum daripada jenis utus dan pandai yang tahu menuang bedil. Maka pada zaman itu-lah di-tuang orang meriam yang besar². Dan ia-lah yang pertama² berbuat kota di-negeri Acheh Daru’s-Salam , dan ia-lah yang pertama² ghazi dengan segala kafir, hingga sendiri-nya berangkat menyerang Melaka. Dan adalah ia keras pada segala barang hukumnya dan amat haibat segala kelakuannya. Dari kerana itulah di-sebut orang akan dia Marhum Kahar (al-Raniri, 1966, pp. 67-83).

Apa yang ingin ditegaskan di sini adalah klimaks kejayaan Kerajaan Aceh yang diwujudkan pada abad ke-17, khususnya pada masa pemerintahan Iskandar Muda, merupakan hasil dari evolusi dan proses yang panjang yang dilalui kerajaan ini dalam sejarahnya. Oleh karena itu, dalam mengkaji prestasi yang diperlihatkan oleh Aceh abad ke-17, perhatian juga diberikan pada masa-masa sebelumnya. Hanya dengan demikian pemahaman perjalanan sejarah kerajaan ini dapat dimaknai secara utuh.

Kejayaan yang dicapai oleh kerajaan meliputi berbagai dimensi, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan keagamaan. Dalam bidang politik, Aceh pada abad ini mampu mewujudkan kemajuan yang signifikan. Semenjak abad ke-16, Kerajaan Aceh telah mampu muncul sebagai kekuatan politik di kawasan barat nusantara. Ini diperlihatkan oleh kemampuannya dalam melakukan kontrol politik yang sering dilakukan melalui kekuatan militer

terhadap wilayah pesisir barat dan timur Pulau Sumatera. Aliansi kerajaan-kerajaan Islam juga telah mampu diinisiasi oleh Aceh dengan beberapa kerajaan-kerajaan Islam di kawasan tersebut, termasuk Demak dan Jepara, dalam rangka mengusir Portugis di Melaka.

Meskipun terjadi pasang surut dalam hal ini, bentuk aliansi ini juga sering dilakukan dengan kerajaan-kerajaan di semenanjung Melayu. Pada abad ini juga hubungan diplomatik dengan berbagai kekuatan Islam di luar kawasan nusantara dilakukan secara lebih intensif, terutama dengan Kerajaan Turki Usmani (Reid, 1965, p. 286). Sesungguhnya, semua hubungan diplomatik ini juga berimplikasi ekonomi dan agama. Kekuatan politik Aceh ini mencapai puncaknya pada abad ke-17, ketika sebagian besar wilayah semenanjung Malaya secara politis tunduk di bawah komando Kerajaan Aceh.

Hegemoni politik ini sesungguhnya sangat ditentukan oleh kemampuan militer yang tinggi. Meskipun secara militer Aceh tidak pernah berhasil mengusir Portugis dari Melaka, namun kekuatan angkatan bersenjata yang juga mendapat dukungan senjata, teknik dan personel Turki sangat disegani di kawasan ini. Hal ini dilihat sebagai ancaman tidak hanya oleh Portugis di Melaka, akan tetapi juga oleh kerajaan-kerajaan yang ada di semenanjung Melayu. Respek yang tinggi ditunjukkan oleh Portugis terhadap kemampuan militer Aceh, yang tidak hanya mendominasi kawasan barat nusantara, akan tetapi juga muncul sebagai saingan mereka yang tangguh di Lautan Hindia (C.R.Boxer, 1965).

Kekuatan militer dan ambisi Aceh yang kuat untuk mengusir Portugis dari Melaka inilah yang sering membuat kerajaan-kerajaan di kawasan ini menjadi khawatir. Hal ini pada gilirannya sering mengganggu aliansi di antara mereka. Di antara sekian banyak contoh dapat disebutkan di sini bahwa pada tahun 1547 dan selanjutnya tahun 1568 Johor, secara tak diduga, muncul di Melaka dalam upaya membantu Portugis mempertahankan diri dari serangan Aceh. Hal yang serupa juga sering ditunjukkan oleh kerajaan-kerajaan Melayu yang lain yaitu Perak dan Pahang.

Sulit memercayai sebuah kenyataan bahwa kerajaan-kerajaan ini, yang telah menganggap bangsa Portugis sebagai musuh bersama secara mengejutkan muncul di Melaka dalam rangka membantu kekuatan yang dipercayai sebagai musuh terbesar umat Islam ini untuk melawan Aceh. Namun, inilah fakta historis yang ironis, sebuah fenomena yang disinyalir oleh R.O.Winstedt sebagai wujud “ketakutan mereka terhadap kekuatan Islam (Aceh) yang baru muncul (R.O.Winstedt, 1961, p. 22).”

Kemampuan militer ini mencapai puncaknya pada masa Iskandar Muda. Kekuatan bersenjata yang tangguh dibangun secara lebih profesional pada masa pemerintahannya. Denys Lombard menegaskan bahwa kekuatan militer Iskandar Muda ketika itu terdiri dari angkatan laut, angkatan darat, pasukan berkuda, pasukan gajah, dan divisi meriam. Dengan kekuatan militer ini, ia melakukan penaklukan terhadap beberapa kerajaan sekutara, seperti Aru (1613), Pahang (1617), dan Johor (1619). Meskipun berakhir dengan kegagalan, Iskandar Muda mengerahkan segala kekuatan militernya untuk menghancurkan Portugis di Melaka pada tahun 1629

Pertumbuhan ekonomi yang kuat juga menjadi ciri yang menonjol Kerajaan Aceh abad ke-17. Perdagangan yang dilakukan dengan banyak pedagang, baik lokal maupun internasional, menjadikan Banda Aceh sebuah kota kosmopolitan yang sangat menguntungkan dari segi ekonomi. Sebagaimana ciri dari semua kerajaan Islam di kawasan Asia Tenggara, "Islam" dan "dagang" berjalan secara bersamaan. Aceh juga muncul dan berkembang sebagai sebuah kerajaan Islam pantai yang berbasis dagang. Hal ini didukung oleh kemampuannya menghasilkan beberapa hasil bumi, seperti lada. Kontrol terhadap beberapa kawasan Sumatera dan semenanjung Melayu juga berimplikasi ekonomi. Hubungan dagang dengan kawasan di luar nusantara, terutama ke wilayah India dan Arab, yang telah berjalan semenjak abad ke-16, terus meningkat. Tentu, ini semua merupakan sumber pemasukan yang utama bagi kerajaan, terutama pada masa Iskandar Muda, ketika sentralisasi mencapai puncaknya (Ito, 1984, p. 17).

Sebuah kerajaan yang kuat, aman, dan makmur pada gilirannya akan berperan secara signifikan dalam melahirkan kemajuan kebudayaan dan peradaban. Dalam hal ini, Aceh sangat diwarnai oleh pandangan dunia keislaman. Dengan kata lain, budaya dan peradaban yang berkembang pada saat itu sangat ditentukan oleh pandangan dunia (*worldview*) masyarakat dan kerajaan yang Islami. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai tradisi kerajaan, perayaan, karya-karya sastra, seni, dan karya-karya intelektual. Namun, perlu ditambahkan juga bahwa unsur-unsur ke-Aceh-an juga masih terlihat, meskipun ia merupakan subordinate dari unsur-unsur keislaman.

Tradisi ritual dan seremonial kerajaan dan keagamaan tidak terlihat lagi pembeda yang jelas antara elemen yang murni kerajaan atau kenegaraan dan keagamaan. Artinya, tradisi kerajaan menyatu dengan tradisi keagamaan. Hal ini dapat dicermati, umpamanya, dalam prosesi kerajaan ketika sultan turun ke masjid untuk melakukan salat Juma'at, perayaan dan prosesi pada hari raya *'Id al-Fitri* dan *'Id al-Adha*, prosesi penyambutan bulan Ramadhan dan lainnya.

Hanya dalam ritual agama yang inti saja, seperti ‘ibadah salat, unsur-unsur tradisi kerajaan tidak mengambil peran. Namun, dalam hal ini kegiatan sebelum pelaksanaan salat, misalnya, adalah sangat berbentuk seremonial kenegaraan.

Menurut Annabel Teh Gallop, satu-satunya fitur pujian yang paling mencolok di surat Iskandar Muda tahun 1615 kepada James seorang Inggris adalah tidak adanya formula atau referensi khusus Islam. Sebagai gantinya ada jejak indeks yang dapat dikenali. Gelar-gelar tampaknya memiliki lebih banyak kesamaan dengan orang-orang sezamannya di Ayutthaya dan Rakhine daripada yang ditemukan dalam korespondensi Melayu nanti. Apa yang secara khusus mengatur pujian-pujian ini selain dari yang ada dalam huruf-huruf Melayu kerajaan berikutnya adalah penekanan kepemilikan barang-barang material (*bahkan ketika ini mungkin memiliki nilai simbolis atau ritual*) dan kesuksesan duniawi, dari pada atribut moral. Teh Gallop berpendapat :

The lack of overtly Islamic or otherwise spiritual or moral elements should be seen as a deliberate omission; the focus on material goods and worldly success reflecting both a relationship which was fundamentally materialistic in nature, and the subject matter of the letter, namely a request for trading rights.

Kurangnya unsur-unsur Islam atau spiritual atau moral yang jelas harus dilihat sebagai penghilangan yang disengaja; fokus pada barang-barang material dan kesuksesan kata-kata yang mencerminkan hubungan yang pada dasarnya bersifat materialistis dan subjek gelar itu, yaitu permintaan untuk hak perdagangan. Meskipun demikian, ia menyimpulkan “kesetiaan terhadap kedaulatan agama adalah jelas dalam judul yang terletak di bagian paling atas surat itu, dalam huruf kecil tapi tak bisa dibantah di sana.” Sangat disayangkan bahwa tidak ada satupun surat melayu asli Iskandar Muda kepada kekuatan muslim melayu lain untuk memungkinkan perbandingan antara surat-suratnya dengan kekuatan muslim dan kekuatan non muslim. Mungkin alasan mengapa Iskandar Muda menggunakan lebih sedikit referensi Islam adalah karena gagasan perang suci yang menandai hubungan antara sultan-sultan Aceh di abad ke 16 dengan Portugis telah mengambil giliran yang lebih komersial.

Tidak seperti Portugis, Inggris dan belanda berlayar ke timur untuk mencari perdagangan bukan konversi. Alasan lain untuk kurangnya referensi Islam adalah perpaduan Islam yang lebih mistis dan sinkretik yang disukai di Aceh semasa kekuasaan Iskandar Muda. Menurut Teh Gallop, Iskandar Tsani mempertahankan penekanan pada deskripsi diri dalam pujian yang dimulai Iskandar muda, tetapi benar-benar berbeda; penekanannya pada kebajikan yang sesuai untuk seorang raja yang menjadi bayangan Tuhan di bumi.

Teh Gallop tidak menyarankan mengapa lebih banyak pencitraan Islami diproyeksikan. Saya membayangkan bahwa gaya Iskandar Thani mirip dengan bapak mertuannya dan keduanya mengadopsi lebih India, konsep kerajaan nusantara. Iskandar Tsani menggunakan gelar Khalifah untuk mempresentasikan dirinya sebagai Penguasa Muslim, sementara pada waktu yang sama mengklaim hak untuk menjadi wakil dari politik muslim di wilayah, tetapi mempertahankan ide Iskandar Muda tentang raja semesta, chakravartin, seperti yang akan ditunjukkan di bawah ini.

Penguasa perempuan di Aceh mengadopsi gelar pendahulunya tanpa mengganti gender. Julukan laki-laki berdaulat *Sultan al-Muazzam wa al-khaqan al-Mukarram* “*the Great Sultan and Illustrious King*”, diterapkan pada mereka juga. *Bustan as-Salatin* dan *Adat Aceh* memanggil ratu Shafiyyah al-Din dan para pendahulunya dengan *Paduka Sri Sultan (His Majesty, the Auspicious Sultan)*. Memang, satu-satunya julukan orang Aceh yang unik adalah *Berdaulat*, Diberikan kepada semua ratu Aceh, sementara semua raja Aceh, bergelar *Johan Berdaulat*.

Dalam surat Iskandar Tsani dia digembar-gemborkan sebagai *Sultan al-Muazzam wa al-khaqan al-Mukarram*, dan nama aslinya dan gelarnya mengikuti julukan penguasa Muslim, *Zill Allah fi al-‘alam* (Shadow of Allah on Earth) dan *Khalifah Allah*. Patut dicatat bahwa Sultanah juga menyandang gelar *Zilla fi al-‘alam* dan *khalifah Allah*, untuk mengilustrasikan bahwa peran dan kewajibannya sebagai bayangan Allah atau representasi Allah di atas bumi sama dengan para pendahulunya yang laki-laki. Bagaimanapun juga dengan gelar yang dipilihnya, *Taj al-‘Alam Shafiyyah al-Din Syah* atau *Shafiyyah al-Din Syah*. (*Taj ‘Alam* berarti “Mahkota Alam atau *Crown of the World*”) dan *al-Din* merepresentasikan dirinya menjadi pelaksana hukum Allah, untuk membedakan dirinya dari para pendahulunya. Sementara mendasarkan kekuasaannya pada statusnya sebagai mahkota atau kedaulatan dunia, dia menempatkan kekuasaannya dengan kuat di atas fondasi bahwa ia dipilih Allah untuk menjadi representasi Allah dalam menjalankan hukum-hukumNya.

Dasar dari pemerintahannya dan penekanannya pada peran dan tugasnya sebagai pemimpin muslim adalah perbedaan utama gelar/julukan mencerminkan dasar legitimasi dan kekuasaan yang berbeda antara Sultanah Shafiyyah al-Din dan para pendahulunya, mencerminkan dasar legitimasi dan kekuasaan yang berbeda. Ada 26 buah atribut yang berbeda di dalam surat Iskandar Tsani. Lima yang tidak diulang berkaitan dengan deskripsi kekayaan materi raja, seperti (*cemerlang cahayanya*), (*mas kurati*), (*gilang-gemilang*), (*suassa*). Penghilangan lainnya adalah deskripsi penguasa sebagai bertabur dan dihiasi dengan permata dan batu mulia. Berbeda dengan

sang suami yang lebih mengedepankan materi, hampir semua formulasi baru sultan bersifat religius atau moral. Perbedaan yang menarik adalah meskipun Safiatuddin mengadopsi gelar khalifah, itu bukan konsep yang lebih egois dan narsistik dari bayangan Tuhan di bumi. Mengikuti konsepsi pra-Islam tentang raja sebagai semi ilahi, tetapi khalifah sebagai wakil atau wakil Allah di bumi untuk melaksanakan hukum-hukum Allah

B. Pandangan Para Ulama tentang Kepemimpinan wanita

Perlu diketahui juga bahwa sifat kepemimpinan pada masa sekarang adalah kolektif kolegial, yaitu melibatkan banyak orang dalam satu pemerintahan. Sehingga seorang perempuan yang menjadi pemimpin, misalnya, tidak harus mengurus semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan karena hal ini akan terasa sangat berat. Ia bisa secara bersama-sama bekerja dengan orang yang terlibat di dalamnya untuk mengurus kepentingan rakyat.

Kesimpulannya adalah, laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk melakukan kebaikan (amal salih) karena keduanya bertanggung jawab untuk memerintahkan kebajikan dan mencegah kemunkaran. Hanya saja, keterlibatan seorang perempuan dalam ranah publik (menjadi pemimpin, misalnya) terlebih dahulu harus memperhatikan dan melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya, misalnya mengatur urusan rumah tangga, karena bagaimanapun juga wanita dibebani kewajiban untuk memelihara harta suaminya yang juga mencakup urusan rumah tangga, memperhatikan pendidikan anak (meskipun hal ini merupakan kewajiban suami-istri). Hal-hal di atas perlu diperhatikan agar tidak terjadi kekacauan dalam rumah tangga yang merupakan pondasi utama untuk membangun sebuah peradaban madani.

Perlu juga dipahami amal salih bukan hanya ada dalam ranah publik (baca: menjadi pemimpin). Amal salih harus dipahami sebagai amalan yang sesuai (pantas) untuk dilakukan oleh individu berdasarkan peran dan posisi yang terdapat pada dirinya. Jika peran tersebut telah dilakukan, bolehlah seseorang melakukan pekerjaan lain dengan tetap memperhatikan aturan dan norma agama Islam.

Raja terbesar Aceh adalah Sultan Iskandar Muda (berkuasa 1607-1636), pada masa kekuasaannya Aceh berhasil menjadi pusat perdagangan internasional, kekuatan politik yang disegani, dan peradaban Islam terkemuka. Sejak berdiri pada abad ke-16, Aceh harus menghadapi Portugis di Malaka dalam bidang ekonomi dan politik. Keduanya terlibat perebutan hegemoni dalam jaringan perdagangan sepanjang Samudera Hindia, juga dalam monopoli pembelian barang-barang tropis dari kerajaan-kerajaan Melayu di sekitar Selat Malaka. Demi perjuangan

merebut hegemoni kekuasaan, Sultan Iskandar Muda mulai membuat kebijakan ekspansionis dengan dukungan kekuatan militer yang besar. Sultan juga membangun sentralisasi daerah penghasil lada di Sumatera sekaligus mengontrol semua transaksi perdagangannya, termasuk juga menerapkan perjanjian sepihak terhadap para pedagang asing di Kerajaan Aceh (Well, 1969, p. 56). Kontrol ketat juga diterapkan untuk memperkuat kekuasaan politiknya yang sentralistik, terkait persoalan-persoalan internal negara sampai pada tingkat di mana Iskandar Muda menjadikan Aceh sebagai salah satu negara Absolut terkemuka di Asia Tenggara (Wells, 1969, p. 14).

Kritikan para sarjana atas visi Iskandar Muda, dalam membangun hegemoni kekuasaannya Sultan Iskandar Muda tidak kuat membangun sistem sosial politik, yang pada kemudian hari rentan memunculkan konflik internal dalam mempertahankan supremasi kerajaan. Hal itu berhubungan dengan “penyebaran (sistem) feodal” dalam kekuasaan politik di Aceh.

Kebijakan Iskandar Muda untuk memberikan negeri-negeri taklukan kepada uleebalang yang saling bermusuhan, yang dia rekrut untuk kepentingan serangannya yang gagal terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1629 (Hurgronje, 1906, pp. 32-33). juga keputusannya untuk mengganti elite-elite dagang yang kuat (orang kaya) di Kerajaan Aceh. Di masa pemerintahan setelahnya, kekuasaan uleebalang ini menjadi warisan turun-temurun. Selanjutnya, uleebalang muncul sebagai panglima perang dan kepala teritorial dari tanah-tanah kerajaan yang diberikan secara permanen (Ito dan Reid, 1985, pp. 201-202). Uleebalang secara perlahan-lahan menjadi pemilik kekuasaan yang riil di daerah pertanian di pedalaman Aceh, yang membuat mereka muncul sebagai kekuatan yang berpengaruh dalam panorama politik Aceh. Ini terjadi pada saat bersamaan ketika Aceh di bawah kekuasaan raja perempuan.

Sementara itu orang kaya, yang pernah dibantai oleh Iskandar Muda, muncul kembali dan memiliki kedudukan kuat dalam politik Aceh. Selama pemerintahan Safiyatuddin Taj Alam syah (1641-1675), dilaporkan bahwa orang kaya membentuk organisasi kuat yang menentukan keputusan-keputusan politik kerajaan. Kekuasaan politik orang kaya bahkan menjadi lebih kuat selama pemerintahan tiga raja perempuan setelah mangkatnya ratu Shafiyatuddin pada tahun 1675. Para orang kaya memiliki kuasa untuk mengangkat dan memahkotai para ratu. Mendudukkan mereka di singgasana kekuasaan tapi tanpa memiliki kontrol dalam urusan-urusan negara. Dengan demikian, orang kaya inilah yang sebenarnya menguasai kerajaan baik dalam ranah politik maupun ekonomi. Dalam situasi tersebut, uleebalang pedalaman datang guna

mendapatkan kembali pengaruh kekuasaan politik mereka di Kerajaan Aceh. Meningkatnya ketergantungan kapital pada produk-produk pertanian, ketika perdagangan mulai berkurang, menjadi kondisi yang menguntungkan bagi munculnya uleebalang dalam politik Aceh vis a vis orang kaya. Karenanya, Aceh mengalami instabilitas politik dan kemunduran perdagangan, dan kemudian kedudukan kerajaan sebagai kekuatan politik terkemuka di bagian barat Nusantara mulai runtuh.

Pasca wafatnya Sultan Iskandar Thani, suami dari Shafiyatuddin Taj Alam terjadi polemik tampuk kekuasaan. Seharusnya yang menggantikan Sultan Iskandar Thani adalah puteranya. Namun kenyataan tidak dapat ditolak, bahwa Sultan belum diberi anak keturunan dari pernikahannya dengan Shafiyatuddin. Masing-masing pihak yang berkepentingan berusaha memanfaatkan momen ini untuk memperkuat pengaruhnya. Begitu pula yang terjadi dengan kelompok elit yang disebut dengan Orang Kaya. Awalnya, mereka ikut mendukung naiknya wanita ke puncak kekuasaan dengan harapan kedepannya nanti kepentingan mereka bisa diakomodir oleh penguasa. Salah satu alasan dukungan diberikan kepada penguasa yang naik dari kaum wanita adalah alasan menjaga alur ekonomi dan perdagangan tetap aman dan masih dibawah kontrol kelompok Orang Kaya. Bisa jadi persepsi tentang kepemimpinan wanita akan sedikit “lunak” dibanding jika kekuasaan dibawah kepemimpinan kaum laki-laki. Mereka pernah merasakan hal tersebut terjadi ketika masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ayah dari Shafiyatuddin Taj Alam.

Harapan dan persepsi yang dibangun diawal pemerintah Shafiyatuddin Taj Alam, kemudian tidak sesuai dengan kenyataan. Sultanah baru ini, tidak berbeda dengan pendahulunya dalam ketegasan dan prinsip dalam memegang keadilan. Merasa bahwa kepentingan ekonomi mereka terancam oleh kekuasaan, timbullah rasa kecewa yang mendalam. Kekecewaan ini bisa jadi kemudian menyulut sikap penentangan dari kelompok elit Orang Kaya terhadap kekuasaan Sultanah. Kemudian ikut membesarkan isu larangan kepemimpinan wanita ditengah-tengah umat. Sengaja isu ini dihembuskan kembali untuk mengumpulkan sebanyak mungkin dukungan memakzulkan kepemimpinan Sultanah Shafiyatuddin Taj Alam. Atau paling tidak menimbulkan kekacauan dan hiruk-pikuk politik, sehingga pihak penguasa tidak bisa tenang dalam mengurus Kerajaan. Dan ketika Kerajaan lemah, mereka dapat mengatur kebijakan-kebijakan yang berpihak atas kepentingan kelompok Orang Kaya ini.

Menurut Jajat Burhanuddin, mengutip tulisan Matheson dan Milner, keberadaan kota Makkah dalam pandangan politik di nusantara abad ke 17, memang lebih menonjol sebagai sumber legitimasi politik, dan tidak terbatas sebagai tempat untuk ritual ibadah haji atau menuntut ilmu agama (thalab al-'ilm). Perjalanan (rihlah) ke Makkah, dapat dimaknai dalam domain politik kerajaan dan diarahkan untuk meningkatkan kekuatan politik (Burhanuddin, 2012, p. 23).

Pengacauan yang dilakukan kaum “wujudiyah “ pada masa pemerintahan Ratu Safiatuddin , telah menjurus ke arah satu usaha pemberontakan, sehingga terpaksa Ratu mengambil tindakan keras yang tidak kenal ampun terhadap mereka atas nasehat Syekh Nuruddin Ar Raniry dan Syekh Abdurrauf syiah kuala yang kemudian menggantikan Nuruddin sebagai Kadli Malikul Adil/ Mufti Besar Kerajaan, karena Syekh Nuruddin meninggalkan Aceh dalam tahun 1067 H (1657 M).

Diantara tindakan-tindakan yang diambil Ratu, dilarangnya berkembang paham “wujudiyah” dalam Kerajaan Aceh Darussalam, dan segala buku/kitab yang mengenai “wujudiyah” itu dinyatakan terlarang membaca dan menyimpannya, baik karangan Syekh Hamzah Fansuri ataupun karangan Syekh Syamsuddin Sumatransy, demikian pula karangan-karangan para ulama pengikut keduanya.

Akibat dari adanya pelarangan ini, maka terjadilah pemusnahan dan pembakaran umum terhadap kitab-kitab karangan kedua ulama tersebut, hal mana telah mencemarkan nama Ratu dalam dunia ilmu pengetahuan, sekalipun alasan beliau dapat diterima akal yang berlandaskan demi untuk keselamatan negara, lebih-lebih kemudiannya setelah terjadi sabotasi oleh golongan “wujudiyah” dengan membakar Istana Darud-dunia, Mesjid Baiturrahman dan Balai Mahkamah Rakyat di masa pemerintahan Ratu Nurul Alam Naqiatuddin Syah, yang akan diriwayatkan sejarah hidupnya. Yang sangat memarahkan Ratu, yaitu kampanye kaum “wujudiyah” yang memafatkan bahwa menurut hukum Islam kaum wanita tidak boleh menjadi raja; fatwa mana langsung ditujukan untuk menjatuhkan Ratu.

Kampanye kaum “wujudiyah” ini hampir-hampir menggoncangkan kedudukan Ratu Safiatuddin, kalau tidak dengan segera Syekh Nuruddin Ar-Raniry mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa wanita dalam Islam sama derajat dengan kaum pria dan berhak menjadi raja; fatwa mana kemudian dikuatkan oleh Syekh Abdurrauf dengan mengadakan dakwah meluas kepada rakyat.

Dengan melihat kepada peristiwa-peristiwa yang dilukiskan di atas jelaslah, bahwa berkecamuknya pertentangan antara aliran Hamzah Fansury dengan aliran Nuruddin Ar-Raniry, pada hakikatnya dikendalikan nafsu politik yang ingin berkuasa, yang dalam kenyataannya tidak segan-segan membangun berbagai tharikat yang bertopengkan tasawuf untuk mencapai keinginan politiknya.

Kesimpulan

Kesalehan Sultanah Aceh, kedermawanan, kehati-hatian dan perlindungan terhadap Islam memastikan bahwa mereka adalah penguasa muslim yang baik. Tantangan yang mereka hadapi adalah bernegosiasi antara menjalankan otoritas mereka dalam dominasi pemerintahan laki-laki dan mengasumsikan peran publik sebagai penguasa tanpa melampaui batasannya. Walaupun ratu tidak terlihat asing, mereka tidak mengusik wilayah yang akan dianggap khusus laki-laki, seperti ruang utama Masjid, begitu juga ritual religius yang biasanya diurus oleh para Imam. Batas-batas ruang dan fungsional dihormati. Hal ini mereka lakukan dengan berkolaborasi dengan ulama laki-laki dan membiarkan mereka menjalankan otoritas keagamaan dan yurisdiksi tanpa gangguan, selama kata akhir ada pada penguasa.

Karakter dan penekanan pengajaran Islam di Aceh sangat tergantung pada kehendak penguasa. Posisi Islam dan bagaimana itu dinegosiasikan dan direkonsiliasikan dengan hukum adat yang ada harus dipahami dalam konteks situasi politik, dan sikap penguasa sendiri. Tidak seperti pendahulu laki-laki, para ratu tidak mendukung faksi agama tertentu atau orientasi tertentu, dalam arti ini mereka mengambil politik dari agama.

Namun, dalam praktek tradisi pemerintahan, mereka ditempa oleh nilai-nilai moral dan agama. Arak-arakan, drama politik dan penekanan pada kekayaan materi dan kekuatan tidak terlalu penting bagi para penguasa wanita ini daripada kesalehan dan keserakahan. Iskandar Muda dan Iskandar Tsani sangat sadar akan kesan diri mereka dan ingin dipersepsikan sebagai raja dari segala raja oleh penguasa lain. Sedikit mencederai ego atau kehormatan pribadi mereka akan mengundang kemarahan mereka dan tanggapan kasar, terlepas dari apakah ini berpotensi merusak kerajaan.

Sebaliknya, Sultanah Shafiyah al-Din menekankan perannya menjunjung tinggi aturan Tuhan dan terlihat adil, pengampun dan murah hati. Eksekusi hukum dan keadilan keduanya lebih manusiawi dan lebih Islami di bawah ratu wanita ini. Meskipun pandangan Islam ratu tidak

sama dengan kelompok ortodoks atau kaum sufi tidak diketahui, mereka adalah pendukung agama, dan pengadilan mereka menjadi pusat studi dan pembelajaran Islam yang paling penting di wilayah ini di bawah penguasa perempuan Islam lebih dipublikasikan tetapi kurang dipolitisasi. Kajian tentang pemerintahan wanita muslim di Bhopal menunjukkan bahwa mereka terlalu saleh, menggunakan islam sebagai kekuatan moral dan modal sosial sebagai dasar dari aturan dan legitimasi mereka. Pemerintahan mereka sukses dikarenakan integritas pribadi, sisi kemanusiaan dan perlakuan yang adil terhadap rakyatnya, dan komitmen mereka yang berdedikasi untuk pemerintahan yang baik (*good governance*).

Daftar Pustaka

A. Sumber Buku

- al-Din al-Raniri, Nur. (1966). *Bustanu's Salatin, Bab II, Fasal 13, disusun oleh T.Iskandar*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Andaya, Leonard Y Andaya. (2001). *Aceh's Contribution to Standards of Malayness*. Achipel: 61.
- Azyumardi, Azhu. (2004). "*Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII&XVIII Akar PembaruanIslam Indonesia*". Prenada Media Jakarta.
- Hadi, Amirul. (2004). *Islam and State in Sumatra; a Study of SeventeenthHlm-century Aceh*. Leiden: Brill.
- Ismail, Nurjannah. (2003). *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: Lkis.
- Lombard, Denys. (1986). *Kerajaan Aceh Jaman Iskandar Muda (1607-1636)*. alih bahasa Winarsih Arifin. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ito, Takeshi. (1984). *The World of the Adat Aceh: a historical Study of the Sultanate of Aceh*. Unpubleished Ph.D dissertation: Australian National University.
- Jajat, Burhanuddin. (2017). *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia*. 2017. Jakarta: Bulan Bintang.
- R.Boxer, C. (1965). *Asian Potentates and European Artillery in the 16th-18th Centuries*. JMBRAS: 38, 2.
- Reid, Anthony. (1969). *Sixteenth Century Turkish Influence in Western Indonesia*. JSEAH 10, 3.

Snouck Hurgronje, C. (1906) *The Achehnese*, vol. 1 trans. By. A.W.S. O'Sullivan. Leiden: E.J Brill.

Subhan, Zaitunah. (1999). *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta; LkiS.

----- (2002). *Rekonstruksi Pemahaman Jender dalam Islam: Agenda Sosio-kultural dan Politik Peran Perempuan*. Jakarta: el-Kahfi

Umar, Nasaruddin. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

Wells, Kathirithamby. (1969). *Between Monopoly And Free Trade : The English East India Company, 1600-1757*. Princeton University Press: Princeton and Oxford.

Yusoff Haslim, Muhammad. (1988). *Pensejaraan Melayu Nusantara*. Kuala Lumpur: Tekes Publishing Sdn.

B. Jurnal

Abu 'Abd Allah Muhammad b. Ismail al-Bukhari. (1908). *Kitab al-Jami' al-Sahih*, ed.by M. Ludolf Krehl, 4 Vols. Leiden: E.J.Brill. vol. 3.

Alhaddar, Muhsin. (2014) dalam *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 10, No. 2 Juli-Desember.

Battuta, Rihlah. (1894). *Arabic text with translation by C. Defremy and B. R. Sanguentti*. Vol.4. Paris: L'Imprimerie Nationale.

Beaulieu, Augustin de. (1764). *The Expedition of Commodore Beaulieu to the East Indies*, in John Harris, ed., *Navigatum atque Itinerantium Bibliotheca, or A Complete Collection of Voyages*, Vol.1. London.

Berge. L. (2015). *Karman dalam Konstruksi Realitas Sosial sebagai Gerakan Pemikiran*. Sudah Telaah Teoritis terhadap Konstruksi Realitas Peter. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Volume 5 No. 3 Maret.

Brooke, J. (1848). *Narrative of Events in Borneo and Celebes down to the Occupation of Labuan : From the Journals of J.Brooke...by Captain Rodney Mundy*, vol.1. London: John Murray.

Bustamam Ahmad, Kamaruzzaman. (2016). *Relasi Islam dan Politik dalam Sejarah Politik Aceh Abad 16-17*. Jurnal al-Tahrir, vol. 16. No.2 November.

Damanhuri. (1428 H/2007 M). *"Naskah Mir-at al-Thullab karya AbdurRa'uf Singkel dan Hadist-hadist Kandungannya: Suatu Kajian Awal*. Indo-Islamika, vol.4 no.1.

F. Lach, Donald. (1965). *Asia in the Making of Europe*. vol. 1, bk.1. Chicago and London: The University of Chicago Press.

F.H. Van Langen, K. (1888). *De inrichting van het Atjehsche staatbestuur onder het Sultanaat*. BKI: 5,3. Hlm 390-410. C. Snouck Hurgronje. (1906). *The Achehnese*, trans.by A.W.S O'Sullivan, vol 1. Leiden: E.J. Brill.

Fathurrahman, Oman. (2003). *Reinforcing Neo-Sufism in the Malay-Indonesian World: Syattariyyah Order in West Sumatra*", *Sudia Islamika*. Vol. X. No. 3.

G. Riddell, Peter. (1998). " *Literal Translantion, Sacred Scripture an Kitab Malay*". *Studia Islamika*, vol. IX, no. 1.